

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal., 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir., 1998, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo., *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Phlipus M. dan Tatik Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hoff, Jerry.. 2000, *Undang-undang Kepailitan Di Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi. Cet. I. Tatanusa, Jakarta.
- M. Hadi, Subhan., 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver, dan Woodhouse Tom, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, mengelola dan Mengubah Konflik* (terj), Grafindo Persada Jakarta: 2000
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nating, Imran., 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice* (Ed. Rev), Massachusetts, Belknap Press of Harvard University of Cambridge.
- Sastrawidjaja, Man., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Sembiring, Sentosa., 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta,
- Tumbuan, Fred B.G. *Pokok-pokok Undang-undnag Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Wudy A. Lontoh, Ed, Bandung, Alumni, 2001.
- Tumbuan, Fred B.G., 1998, *Ciri-Ciri Utama PKPU Sebagai Dimaksud Dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bernadette., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja., 1999, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Makalah, Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal dan Internet

Adlin, Mukhlis., *Tugas Kurator Dalam Kepailitan*, Makalah Disajikan Dalam Seminar Sehari Undang-Undang Kepailitan Kerjasama STIH Graha Kirana dengan AEKI, Medan, 1998

American Bankruptcy Institute, *What Ever Unsecured Creditor Should Know About Chapter 11*, Chapter 11 – “101”, American Bankruptcy Institute Journal : Issues and Information for the insolvency professional). Reprinted with permission from the ABI Journal, Vol. XXIII, No. 5, June 2004

Hadjon, Philipus M., *Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generalis*, Makalah Pelatihan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.

Juventhy M. Siahaan., 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Curang Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Mulyadi, Kartini, 1998, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Tentang Peraturan Kepailitan, Jakarta, 24 Oktober 1998.

Ratnawati, Theresia Endang., *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009.

Setiawan, *Undang-undang Kepailitan dan Likuidasi Serta Penerapannya Dalam Pengadilan Niaga*, Makalah pada Seminar Penyelesaian Utasng, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi, Kerjasama Lembaga

Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winaya Dharma,
Jakarta, 19 Oktober 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. (Staatsblad Tahun 1947

Nomor 23) (Diumumkan dengan Maklumat, tanggal 30 April 1847).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) (Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 18 Oktober 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3)
(Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009).